



PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERSUMBER DARI PARTISIPASI MASYARAKAT

Muhajirin✉

SIT MI Kejuruan Al Hakim Kalisapen Slawi, Slawi, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2012
Disetujui Juli 2012
Dipublikasikan September 2012

Keywords:
Management of education financing;
Community participation

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, telah diamanatkan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat/orang tua siswa. Fokus penelitian adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan dana dari masyarakat, sedangkan rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), proses penggalan dana dari masyarakat, proses pembelanjaan pembiayaan pendidikan, proses pengawasan pembiayaan pendidikan, dan proses pelaporan pembiayaan pendidikan. Tujuan penelitian untuk mengumpulkan informasi guna mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu proses penyusunan RAPBS termasuk katagori partisipatif, proses penggalan dana dari orang tua siswa melalui komunikasi secara intensif dengan orang tua siswa. Sumber pembiayaan yang berasal dari orang tua siswa, Infaq pengembangan sekolah dan wakaf, sumbangan pengembangan pendidikan, uang POMG, uang komputer, uang kegiatan, uang ekstrakurikuler, dan uang ZIS. Simpulannya adalah proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) telah dilakukan secara partisipatif.

Abstract

Public participation in education, has been mandated by Law No. 20 of 2003 is therefore necessary financing management resulting from participation in community / parents. Research focus is the management of funds from public education funding, while the formulation of the research problem is how the process of planning the school budget revenues and expenditures (RAPBS), the process of extracting funds from the public, the education expenditure finance, education finance process monitoring, and reporting processes of education financing. The purpose of research to gather information in order to describe and analyze the management of the education funding comes from community participation. This study uses descriptive qualitative approach. The data was collected using interview techniques, observation and documentation. The results of the research process including the preparation of School Budget category participatory process of extracting funds from the parents of students through intensive communication with parents. Source of funding comes from the student's parents and school development Infaq endowments, donations of education, PTA money, computer money, money activities, extracurricular money, and money ZIS. Conclusion is the process of planning the budget revenue and expenditure of schools (RAPBS) have been conducted in a participatory manner.

©Universitas Negeri Semarang 2012

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, telah diamanatkan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 disebutkan “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”, dan pada pasal 9 berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka masyarakat berhak mengetahui pendayagunaan apa yang telah disumbangkannya kepada lembaga pendidikan, baik tingkat efektivitas maupun tingkat efisiensinya. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat/orang tua siswa. Pembiayaan sebagai salah satu dari dimensi itu menempati posisi yang sangat penting karena merupakan jantung dari pergerakan praktek pendidikan di manapun berada. Arah perkembangan dari hal itu adalah relevansi akademis, atmosfir akademis yang baik, institusional managemen, filosofis, efisiensi dan inovasi. Manajemen/pengelolaan keuangan sekolah/madrasah menurut Permana (2005) “merupakan proses perencanaan, penggalan sumber, penyusunan anggaran dan penggunaan serta pelaporan keuangan di tingkat sekolah/madrasah”.

Manajemen keuangan menurut Commonwealth of Learning and The Southern African Development Community Ministries of Education. (2000) covers such areas as the procurement of funds, their allocation, monitoring their use in the interest of accountability and producing financial reports for the relevant stakeholders. Di dalam manajemen Pembiayaan Pendidikan terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Manajemen Pembiayaan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan Pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, Kepala Sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite

sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Turmudi (2004) sumber pembiayaan dari masyarakat dapat berupa zakat, wakaf atau pemberian yang umumnya berupa tanah atau bangunan bagi kemaslahatan ummat Infaq, sodaqoh, dan zariyah, hibah, hadiah, yaitu pemberian dalam bentuk uang, emas, bangunan atau tanah. *Fidyah*, yaitu sumbangan wajib 10 % dari keseluruhan zakat. Wasiat, yaitu pemberian yang umumnya berbentuk tanah, emas, atau bangunan sebelum penyumbang meninggal. *Diayah*, yaitu pemberian akibat janji yang dibuat, sehingga si penjanji tersebut harus *member* makan sekurang-kurangnya 60 orang miskin atau *member* uang yang setara ke pesantren atau lembaga islam. Uang berkah, yaitu pemberian yang diambil dari keuntungan lebih melalui kegiatan usaha. *Nadzar*, yaitu pemberian untuk membuktikan janji, waris, yaitu pemberian harta peninggalan dari keluarga yang tidak punya keturunan ke lembaga islam. *Lutfah*, yaitu *memberikan* sebuah barang atau uang kepada sekolah akibat dari sulitnya menemukan si pemilik yang kehilangan barang tersebut, *mudarabah*, sekolah menjalankan usaha dengan menyewa sebagian tanah atau bangunan untuk mendapatkan keuntungan guna untuk menyokong kegiatan sekolah, sumbangan alumni dalam bentuk uang atau yang lainnya, dan kotak amal.

Isu yang menarik untuk dipakai sebagai upaya menggalang dukungan menurut Dirjen PMPTK (2007) harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu isu memang benar-benar penting dan berarti bagi masyarakat. Isu sebaiknya dalam lingkup yang terbatas lebih dahulu serta isu tersebut memiliki kekhasan, isu harus tetap mencerminkan adanya tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang, isu yang diungkapkan memiliki landasan untuk membangun kerjasama lebih lanjut dimasa depan, dan apabila memungkinkan ajak beberapa tokoh masyarakat untuk merumuskan isu penting yang perlu diangkat sebagai dasar untuk membangun kerjasama dan dukungan. Proses penggunaan atau pembelanjaan biaya menurut Prihatin (2011) merupakan kegiatan yang menyangkut proses dan prosedur penggunaan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”. Sisi lain dari pembiayaan pendidikan adalah alokasi, untuk hal ini pembiayaan dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu pembiayaan langsung

dan pembiayaan tak langsung. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan, antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku". Sedangkan Dirjen Dikdas dan Dirjen Pendidikan Islam (2011) mendefinisikan pengawasan. Sebagai usaha yang dilakukan dengan mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Kegiatan terakhir dari pengelolaan keuangan adalah pelaporan. Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Pendidikan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. Pengertian laporan menurut Dirjen Dikdas dan Dirjen Pendidikan Islam (2011) adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan yang utama.

Fokus penelitian untuk memahami realitas empirik pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh SIT MI Luqman Al Hakim Kalisapu Slawi Kabupaten Tegal. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)? (2) Bagaimana proses penggalan dana dari masyarakat? (3) Bagaimana proses pembelanjaan pembiayaan pendidikan dana yang bersumber dari masyarakat? (4) Bagaimana proses pengawasan pembiayaan pendidikan dana yang bersumber dari masyarakat? (5) Bagaimana proses pelaporan pembiayaan pendidikan dana yang bersumber dari masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi guna mendiskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat di SIT MI Luqman Al Hakim Kalisapu Slawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, dengan studi kasus dengan latar penelitian di SIT MI Luqman Al Hakim Kalisapu Slawi

dengan berfokus pada pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat. Proses pencarian data mengikuti prinsip bola salju (*snowball sampling*). Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala; perilaku/tindakan, perkataan, ucapan dan pendapat para pengelola yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi dengan sumber untuk menjamin validitas data hasil penelitian, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyusunan RAPBS di MI Luqman Al Hakim dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap I, II dan tahap perencanaan RAPB yayasan, serta melibatkan semua komponen sekolah. Bentuk perencanaan pembiayaan dituangkan dalam bentuk RKAS. Kegiatan-kegiatan dalam penyusunan RAPBS antara lain evaluasi program, pembentukan kelompok dan koordinator, identifikasi kebutuhan dana dan sumber dana, identifikasi kegiatan, serta penetapan RAPBS.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka proses penyusunan RAPBS di MI Luqman Al Hakim, termasuk katagori penyusunan RAPBS yang partisipatif. Dalam proses penyusunan RAPBS MI Luqman Al Hakim menggunakan pendekatan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

Prinsip-prinsip penyusunan RAPBS, yaitu perencanaan disusun mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran, RKAS disusun untuk satu tahun pelajaran yang meliputi dua tahun berjalan, terdiri dari beberapa sumber pembiayaan pendidikan, rencana kegiatan merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dan terjangkau, proses penyusunan melibatkan semua komponen sekolah. Berdasarkan temuan di atas apa bila dibandingkan dengan gambaran yang disampaikan Dirjen Dikdas dan Dirjen Pendidikan Islam (2011) memberikan gambaran prinsip-prinsip penyusunan rencana yang baik

antara lain terpadu, mencakup perencanaan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah. Multi tahun, mencakup periode 4 tahun. Multi sumber, mengindikasikan jumlah dan sumber dana masing-masing program. Berbasis kinerja, adalah semua program/kegiatan memiliki indikator yang harus jelas dicapai dengan jelas, disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah/madrasah.

Penggalan dana dari masyarakat antara lain; sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKAS sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menarik masyarakat untuk berperan serta dalam pembiayaan pendidikan antara lain dengan selalu melibatkan orang tua secara profesional dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjalin komunikasi secara intensif dengan orang tua siswa (dalam kegiatan buka bersama di rumah siswa, kegiatan pengajian rutin bulanan di sekolah antara orang tua dan pihak yayasan), melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan di sekolah yang bersifat sosial (Pasar Murah, pengobatan gratis, peduli bencana dan lainnya), *memberikan pelayanan konsultasi* bagi siswa yang bermasalah baik di sekolah maupun di rumah, *Calling Tahajud*, kegiatan mengirimkan SMS oleh wali kelas terutama bagi siswa yang kelas 6 untuk melakukan sholat malam, pertemuan rutin bulanan dengan orang tua (POMG dengan kegiatan antara lain; ESQ, Pengajian, Outbond, Pertemuan Wali kelas), *memberikan SMS* sebagai pemberitahuan setiap ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.

Berdasarkan temuan di atas maka, upaya-upaya yang dilakukan oleh SIT MI Luqman Al Hakim telah memenuhi kriteria upaya menggalang partisipasi masyarakat, bahkan cenderung melakukan kegiatan dalam upaya menggalang partisipasi masyarakat dana pembiayaan pendidikan yang tidak dilakukan oleh sekolah lain yang sederajat yang berada disekitarnya. Bentuk-bentuk dana yang diperoleh dari masyarakat (orang tua siswa) antara lain Infaq dan wakaf, SPP, Uang Kegiatan, Uang POMG, uang Ekstrakurikuler, Uang ZIS, Uang pendaftaran siswa baru, dan uang seragam, serta uang hibah. Menurut Dirjen PMPTK (2007) dapat berupa: sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran BP3, dan SPP. Selain itu bisa juga sekolah mengembangkan penggalan dana dalam bentuk Amal jariyah, Zakat mal, Uang tasyakkuran, dan Amal Jumat. Berdasarkan pendapat di atas apabila dikomparasikan dengan jenis pengeluaran orang

tua siswa di SIT MI Luqman Al Hakim, maka ada beberapa jenis pengeluaran yang sama.

Prosedur penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat antara lain ; ada usulan dari sekolah, adanya persetujuan dari direktur pendidikan sebagai pengelola dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat atau orang tua. RKAS yang telah ditetapkan sebagai RAPB yayasan, oleh direktur pendidikan selaku pengelola keuangan akan dijadikan pedoman dalam penggunaan keuangan. Pembelanjaan dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat digunakan antara lain untuk membiayai sebelas program sekolah, dan program non sekolah. Program sekolah yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah sedangkan program non sekolah dilaksanakan oleh pihak yayasan. Prosedur pembukuan penggunaan keuangan yang bersumber dari masyarakat antara lain semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dicatat dalam buku kas, pencatatannya dilaksanakan setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran uang, dan buku kas ditutup setiap akhir bulan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pengeluaran pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat di SIT MI Luqman Al Hakim terdiri Program Sekolah, Program Non Sekolah. Proses pembukuan penggunaan dana dari orang tua siswa yang dilakukan MI Luqman Al Hakim menggunakan aturan yayasan tetapi berpedoman pada pembukuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hal ini untuk mempermudah dan meringankan petugas pencatat keuangan (bendahara). Proses pembukuan secara berturut-turut terdiri dari Surat Usulan Pencairan Dana (SUPD) yang dibuat oleh sekolah (penyelenggara kegiatan) yang dilampiri rincian kegiatan, Surat Perintah Perintah pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh petugas (Direktur Pendidikan yayasan), Rakapitulasi penggunaan dana, Nota dan Kwitanasi belanja barang, dan Lampiran-lampiran pendukung pengeluaran uang. Apabila dikomparasikan dengan teori menurut Dirjen PMPTK (2007) yaitu orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membawa uang atau surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan teratur. Berdasarkan pendapat tersebut SIT MI Luqman Al Hakim telah melakukan pencatatan terhadap semua pengeluaran pendanaan yang berasal dari masyarakat (orang tua siswa).

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan MI Luqman Al Hakim yaitu menentukan standar pengawasan, dilakukan pengukuran hasil yang telah dicapai,

membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar ketercapaian, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana dan standar. Prosedur pengawasan yang dilaksanakan MI Luqman Al hakim sebagai yaitu prosedur pemantauan, prosedur penilaian, dan prosedur pelaporan. Sasaran pengawasan antara lain jumlah, kualitas, fungsi pendanaan, dan efesiensi dana.

Jenis pengawasan yang dilakukan di MI Luqman Al Hakim dilakukan dengan pengawasan terus menerus, berkala dan insidental. Pengawasan pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan oleh: yayasan, komite sekolah, kepala sekolah, dan pengawas pemerintah. Waktu pelaksanaan pengawasan adalah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, dan setiap tahun. Langkah-langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh yayasan dan komite sekolah SIT MI Luqman Al Hakim dalam penggunaan dana pendidikan yang berasal dari orang tua siswa telah memenuhi standar langkah-langkah pengawasan, karena langkah-langkah pengawasan di SIT MI Luqman Al Hakim memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009) proses pengendalian dilakukan melalui langkah-langkah yaitu menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard dan menentukan penyimpanan jika ada, dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Dari hasil perbandingan tersebut pengawasan yang dilakukan oleh MI Luqman Al Hakim dapat dikatakan sebagai langkah-langkah yang mengarah pada proses pengelolaan dana yang transparan, akuntabilitas, efektif, dan efisien.

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari masyarakat atau orang tua siswa, antara lain bendahara menyampaikan laporan pada direktur pendidikan, direktur pendidikan menyampaikan laporan pada kepala sekolah, komite sekolah, kepala sekolah dan komite menyampaikan laporan pada orang tua siswa. Disamping itu kepala sekolah juga memberitahukan kepada guru dan karyawan tentang kondisi keuangan setiap akhir minggu, yaitu melalui kegiatan rapat kerja sabtu. Penerima laporan penggunaan dana bersumber dari masyarakat adalah: yayasan, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. Selain itu apabila ada pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sekolah akan memberikan

sesuai dengan kebutuhan. Unsur-unsur pelaporan antara lain setiap kegiatan harus dilaporkan, laporan keuangan harus disimpan dengan baik, bentuk laporan merupakan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran, dan waktu pelaporan harus terus menerus. Isi laporan yang dilakukan oleh MI Luqman Al Hakim, antara lain buku kas, bukti-bukti pengeluaran, foto copy SUPD, dan foto copy SP2D. Waktu penyampaian laporan yang dilakukan MI Luqman Al Hakim, dapat disimpulkan sebagai berikut: laporan disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain setiap ada kegiatan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Bentuk laporan yang disampaikan oleh pihak MI Luqman Al Hakim adalah dalam bentuk tertulis, dan lisan. Berdasarkan data tersebut apabila dikomparasikan dengan teori yang dikemukakan Dirjen Dikdas dan Dirjen Pendidikan Islam (2011) memberikan gambaran tentang unsur-unsur laporan pertanggungjawaban antara lain setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan didata dengan rapi dalam urutan nomor tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Bentuknya berupa laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana dari penanggungjawab/pengelola ditingkat sekolah harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Sedangkan laporan yang bersifat multi sumber dilaporkan pula ke masyarakat. Waktu pelaporan, laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

SIMPULAN

Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang dilakukan oleh SIT MI Luqman Al Hakim telah dilakukan secara partisipatif. Sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat dan orang tua siswa dan yayasan memiliki diversifikasi yang banyak. Pembelanjaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat diperuntukkan untuk membiayai program sekolah dan program non sekolah. Pengawasan dan pengendalian pembiayaan pendidikan yang ber sumber dari orang tua siswa dan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengawasan. Pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan

peraturan tentang pelaporan keuangan sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Commonwealth of Learning and The Southern African Development Community Ministries of Education. 2000. *Financial Management In Schools*. Commonwealth of Learning and The Southern African Development Community Ministries of Education. http://peoplelearn.homestead.com/MEdHOME/MANAGEMENT/FINANCIAL_MANAGEMENT_IN_SCHOOLS.pdf. diakses 5 Maret 2012
- Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Islam. 2011. *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah (Materi Pelatihan Sekolah/Madrasah)*. Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama RI. Jakarta
- Dirjen PMPTK. 2007. *Manajemen Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Sekolah..* Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Hasibuan, H. Malayu. S.P. 2009. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. Jakarta
- Permana, Johar. 2005. *Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Sumber Dana Bahan Disadur Untuk Diklat Manajemen Berbasis Sekolah MTs Angkatan III*. Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
- Prihatin, Eka. 2011. *Teori Administrasi Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Turmudi, Tedi. 2004. *Strategi Pemberdayaan Peranserta masyarakat Dalam Pembiayaan pendidikan di Pesantren*. Laporan Tesis Program Pasca Sarjana. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional